



PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, OTONOMI FISKAL DAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA PROPINSI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN SELATAN

Sri Suranta
 Bandi
 M. Syafiqurrahman
 Halim Dedy Perdana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret
 *srisuranta@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the Local Government Financial Performance. This study uses a sample of District and City Government Work Units in the Provinces of Central Java and South Kalimantan. Data can be obtained from the Local Government Financial Statements (LKPD) for 2012 to 2016. The factors are Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds and Fiscal Autonomy. Hypothesis testing use multiple regression analysis. The results of the analysis state that these three variables, Regional Original Revenue (PAD), Balancing Fund and Fiscal Autonomy affect the Local Government Financial Performance of Central Java and South Kalimantan.

INFO ARTIKEL

Diterima: 27 Agustus 2018
 Direview: 31 Agustus 2018
 Disetujui: 17 Desember 2018
 Terbit: 28 Desember 2018

Keywords:

Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds and Fiscal Autonomy, Local Government Financial Performance.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim dan Kusufi, 2012). Padahal dari

hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Dwijayanti dan Ruserlistyanti, 2013).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (profits atau net income), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah (Rochmah, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengungkapkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan (PP 29 tahun 2014, pasal 16).

Renyaan, *et al.* (2012) meneliti pengaruh otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Papua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikelola, otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mampu memperbaiki kinerja pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi keuangan dan efektivitas pembiayaan daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi luas kinerja keuangan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas keuangan daerah.

Udirizqi, *et al.* (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh opini audit, rekomendasi audit tindak lanjut, dan indeks persepsi korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan jumlah sampel sebanyak 48 sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan rekomendasi audit tindak lanjut dan indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dewi, *et al.* (2015) meneliti secara empiris faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah, (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah, dan (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Rochmah (2015) meneliti untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang digunakan

adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten dan kota baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kalimantan Selatan. Berdasar Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014, salah satu ukuran kinerja adalah membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja (efektivitas). Oleh karena itu, variabel kinerja pemerintah daerah yang akan digunakan adalah efektivitas. Adapun faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini berdasar pada penelitian sebelumnya, antara lain: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Otonomi Fiskal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk kinerja efektivitas? (2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk kinerja efektivitas? (3) Apakah Otonomi Fiskal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk kinerja efektivitas?

LANDASAN TEORI

Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Kinerja keuangan pemerintah dalam penelitian ini adalah ukuran efektivitas, yaitu rasio realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU NO. 33/2004). Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi (UU No. 33/2004). Dana perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Otonomi Fiskal

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Renyaan (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Papua. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data subjek dan data dokumenter. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik deskriptif untuk masing-masing variabel indikator otonomi fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Sedangkan untuk menguji hubungan hipotesis antar variabel, penelitian ini menggunakan alat analisis dengan metode Parsial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketika dikelola otonomi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mampu memperbaiki kinerja pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi keuangan dan efektivitas pembiayaan daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik dapat mengurangi luas kinerja keuangan dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas keuangan daerah.

Nofianti, et al. (2014) meneliti untuk menguji beberapa isu utama, yaitu pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengawas internal pemerintah terhadap pelaksanaan Good Governance Governance (GGG) dan pengaruh pelaksanaan GGG terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini menggunakan penelitian explanatory dengan menggunakan kuesioner sebagai data primer dan Laporan Evaluasi Kinerja Akuntabilitas di Unit Prasarana Lokal Provinsi Riau sebagai data sekunder. Teknik sampling yang digunakan adalah proporate clustering random sampling. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 57 Instansi Unit Pemerintah Daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan kompetensi aparatur pemerintah daerah dan profesionalisme aparat pengendalian internal pemerintah telah berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan GGG dan penerapan GGG telah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Udirizqi, et al. (2016) meneliti untuk mengetahui pengaruh opini audit, rekomendasi audit tindak lanjut, dan indeks persepsi korupsi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 48 sampel. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan rekomendasi audit tindak lanjut dan indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sutaryo dan Winarno (2013) menguji karakteristik hubungan Parlemen (komposisi, ukuran, struktur kepemimpinan, masa jabatan, latar belakang, status, ukuran pemerintah daerah) dengan

kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 91 pemerintah daerah sebagai sampel terpilih dengan metode purposive sampling. Data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil pencarian di situs pemerintah daerah dan Departemen Dalam Negeri Kementerian Negara Republik Indonesia. Analisis data menggunakan model regresi dengan uji univariat dan multivariat. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran parlemen dan status pemerintah daerah mempengaruhi kinerja pemerintah daerah baik univariat maupun multivariat. Hasilnya juga menunjukkan bahwa interaksi antara ukuran dan latar belakang pendidikan, komposisi anggota dewan dan komposisi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Adapaun untuk masa jabatan, dan struktur kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil ini membuktikan bahwa pelaksanaan pemantauan di Indonesia adalah bangunan yang lebih dari sekedar tata kelola biaya transaksi yang memajukan utilitas individu atau peserta.

Dewi, et al. (2015) meneliti secara empiris faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Bangli di mana jumlah responden sebanyak 81 orang. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah. (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah. (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah. (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Rochmah (2015) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan, belanja modal, ukuran legislatif, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Rahayu (2017) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia melalui perspektif *upper echelon theory* dan karakteristik pemerintah daerah. Sebagai variabel independen, dari perspektif *upper echelon theory* menggunakan karakteristik kepala daerah dengan proksi masa kerja, tingkat pendidikan dan umur. Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan rasio tingkat kemandirian dan tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan skor hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dari Kemendagri. Setelah melakukan analisis regresi dengan metode random effect model (REM) atas data panel dari 32 provinsi di Indonesia selama tahun 2013 – 2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah berupa tingkat kemandirian berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan karakteristik kepala daerah dan tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

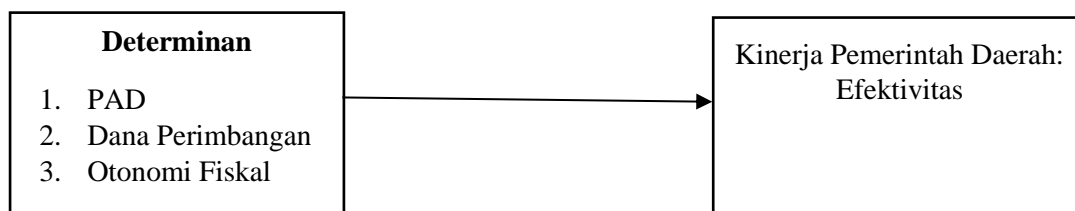
Rustiyaningsih (2014) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah di Indonesia (ukuran, pendapatan daerah, transfer antar pemerintah, total pengeluaran, kewajiban, populasi), dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Sampelnya adalah pemerintah daerah di Indonesia yang mempresentasikan data lengkap. Data sekunder dikumpulkan dengan metode dokumenter, dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, transfer antar pemerintah, total pengeluaran, kewajiban, dan temuan audit BPK tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara, pendapatan asli daerah dan populasinya signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ilmiyyah (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2012- 2015. Variabel penelitian yang digunakan adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 15 kabupaten/kota dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel-variabel independen yaitu opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan tingkat kemandirian daerah. Secara parsial, variabel opini audit, ukuran legislatif, *size*, *leverage*, dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasar landasan teori dan riset sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah berikut ini.

- H₁ Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk efektivitas.
- H₂ Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk efektivitas.
- H₅ Otonomi Fiskal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dalam bentuk Kemandirian Keuangan Daerah dalam bentuk efektivitas.

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN
Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode pengumpulan data secara purposive sampling, yaitu untuk memperoleh sampel yang memenuhi kriteria. Sampel penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di

Wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan, periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Dan (2) Mendapat opini WTP dan WTP DPP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, karena mengandung informasi yang dapat diandalkan.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio efektivitas, yaitu rasio Realisasi PAD dibagi dengan Target PAD. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen, adalah: (1) Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah, (2) Dana perimbangan, terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Otonomi Fiskal, diukur dengan PAD dibandingkan Pendapatan Daerah lainnya.

Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penelitian melakukan penelusuran ke beberapa dokumen berupa laporan keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada periode 2012 sampai dengan 2016.

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Data ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis terlebih dahulu akan dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Analisis normalitas ini diperlukan sebagai persyaratan dari uji beda untuk dua sampel yang independen. Untuk mendeteksi normalitas data pada penelitian ini akan digunakan uji nonparametrik yaitu Kolmogrov-Smirnov. Beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistik atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah: (1) Bila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang normal dari rasio-rasio keuangan maka terhadap rasio tersebut digunakan uji Regresi Berganda, dan (2) Namun bila hasil pengujian normalitas data menghasilkan suatu penyebaran yang tidak normal dari rasio-rasio keuangan maka terhadap rasio tersebut digunakan uji *Run test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua Satker Kabupaten dan Kota baik Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Kalimantan Selatan. Jumlah populasi kedua propinsi, adalah Propinsi Jawa Tengah sebanyak 36 satker sedang Propinsi Kalimantan Selatan sebanyak 14 satker. Adapun sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Sampel Penelitian

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Populasi (satker) thn 2012 sd 2016 (50 x 5)	250
2.	Data Outlier	10
3.	Sampel Penelitian	240

Hasil Analisis Data

Berdasar data yang dapat diolah, dilakukan analisis data. Hasil analisis adalah berikut ini.

Tabel 2
Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual	Standardized Residual
N		240	240
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	,18993777	,99370403
Most Extreme Differences	Absolute	,083	,083
	Positive	,083	,083
	Negative	-,035	-,035
Kolmogorov-Smirnov Z		1,285	1,285
Asymp. Sig. (2-tailed)		,074	,074

a. Test distribution is Normal, b. Calculated from data.

Berdasar tabel 2 di atas, data penelitian ini berdistribusi normal karena hasil uji kolomogorov smirnov menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,74. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05.

Tabel 3
Uji Model

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,206	3	,402	11,004	,000 ^b
	Residual	8,622	236	,037		
	Total	9,828	239			
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	,350 ^a	,123	,112	,19114	1,532	

a. Predictors: (Constant), LDaper, Otfis, LPAD_R

b. Dependent Variable: Kin

Tabel 4
Uji Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,521	,498		5,060	,000
	LPAD_R	,316	,077	,634	4,123	,000
	Otfis	-,422	,090	-,580	-4,701	,000
	LDaper	-,470	,112	-,383	-4,184	,000

a. Dependent Variable: Kin

Berdasar tabel 3, model dalam penelitian ini merupakan model yang sudah fit. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi F kurang dari 0,05. Nilai adjusted R2 sebesar 11,2% menunjukkan bahwa variabel independen dalam model ini memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 11,2%.

Berdasar tabel 4, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Otonomi Fiskal pada tingkat signifikansi 5%, Hasil ini sesuai dengan penelitian Rochmah (2015) bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasar analisis data dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Otonomi Fiskal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

Saran

Variabel independen dalam penelitian ini hanya dapat mempengaruhi variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemda) sebesar 11,2%, selebihnya sebesar 88,8% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang lain selain yang sudah diuji dalam penelitian ini, misalnya pertumbuhan ekonomi dan leverage (Roshmah, 2015).

REFERENSI

- Abriansyah, Rizky Yoga Cristian, 2013, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, <http://eprints.upnjatim.ac.id/4637/1/file1.pdf>.
- BPK, 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK, 2013, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK, 2014, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK, 2015, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Cherrya, Dhia Wenny. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No.1, Tahun 2012.
- Dewi, Mertyani Sari, Nyoman Ari Surya Dharmawan, dan Desak Nyoman Sri Werastuti, 2015, Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli), e-journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No. 1.
- Dwijayanti, R. dan Ruserlistyanti. 2013. “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Indonesia*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.12 No.1, Edisi Maret 2013, Hal. 43-66.
- Eriadi. 2004. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Terhadap Perubahan Regulasi Keuangan Daerah)*. Tesis tidak Dipublikasi.
- Florida, Asha. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan (<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4027>, diakses tanggal 4 Desember 2010).
- Ghozali, Imam, 2001, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gomes, Ricardo Corrêa, Kamilla Alves Rodrigues Ferreira, Ana Claudia Pedrosa de Oliveira, and Luciana de Oliveira Miranda Gomes, 2009, Determinant Factors to Local Government Performance: What Is Stakeholder’s Role in the Process? EnANPAD XXXIII, September, 19th until 23th 2009.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmi, Amiruddin Zul, Dwi Martani, 2014, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, [Http://www.educipta.com/wp-content/uploads/2014/10/Analisis-Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Tingkat-Pengungkapan-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Provinsi.Pdf](http://www.educipta.com/wp-content/uploads/2014/10/Analisis-Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Tingkat-Pengungkapan-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Provinsi.Pdf).
- Ilmiyyah, Nyayu Miftahul, Evada Dewata, dan Sarikadarwati, 2017, Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 5, No. 1, pp. 147-162.
- Maryanti, Ulfi dan Endrawati, 2010, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alikasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Sumatera Barat, *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, Vol. 5, No. 2 Desember 2010, pp. 68-84.
- Mega, Ayuningtiyas. 2015. *Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun Anggaran 2010-2013*. Semarang. Skripsi tidak Dipublikasi.
- Munir, Dasril, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manjemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Ngomuo, Sarah I., and Man Wang, 2015, Measuring Performance in Public Sector Organizations: Evidence from Local Government Authorities in Tanzania, *European Journal of Business and Management*, Vol.7, No.9.
- Nofianti, Leny, Novie Susanti Suseno, 2014, Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG) and Their Implications towards Performance Accountability, *Social and Behavioral Sciences* 164, pp. 98 – 105.
- Padovani, Emaunuele, and Eric Scorsone, 2007, Challenges in the Comparative Analysis of Local Government Bureaucracy and Performance Measurement: The Case of Italy and the United States European Group of Public Administration Annual Conference 2007, Madrid, 19 -22 September.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah*.
- Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Rahayu, Winarso Tri, 2017, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perspektif Upper Echelon Theory dan Karakteristik Pemerintah Daerah. <http://digilib.unila.ac.id/29116/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- Reanyaan, James Paul Alfred, Salim Ubud, M.S. Idrus, Djumahir, 2012, Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance (A Study on Local Government Of Papua Province), *International Journal of Business and Management Invention*, Volume 1, Issue 1, December 2012, PP.16-21.
- Rochmah, Siti Nur, 2015, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012). <http://eprints.ums.ac.id/37223/22/Naskah%20Publikasi.pdf>.
- Rustiyarningsih, Sri, dan Intan Immanuela, 2014, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah, *Widya Warta*, No. 02 Tahun XXXV III, Juli 2014.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sutaryo, Jaka Winarna, 2013, Karakteristik DPRD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dukungan Empiris dari Perspektif Teori Keagenan. Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, 25 -28 September 2013.
- Udirizqi, Alfun Nurhidayah, Setyobudi Irianto, Bambang Setyobudi and Sukirman, 2016, The Influence of Audit Opinion, Follow Up Audit Recommendations, and Corruption

Perceptions Index toward Financial Performance of Local Government (Empirical Study of the District/City in Indonesia). Available <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2740881>.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Tamboto, Laedy, Jenny dan Lidia. 2014. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara". Jurnal EMBA, Vol.2 No.2, Edisi Juni 2014, Hal. 755-767.

Whittaker, James B. 1995. *The Government Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institut: Arlington, Virginia.

Yusfany, Andy, 2015, The Efficiency of Local Governments and Its Influence Factors, International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 4, Issue 10, October 2015.